



KPK KUNJUNGI PEMKOT

Layanan Publik Harus Ditingkatkan

YOGYAKARTA (SI) - Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Balai Kota Yogyakarta untuk meninjau pelaksanaan pemerintahan yang bersih di wilayah ini. KPK ingin melihat kemajuan Kota Gudeg dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Luthfi Ganna Sukardi mengungkapkan, tahun 2006 lalu Yogyakarta termasuk kota yang memberikan inovasi-inovasi baru bagi wilayahnya. Berbagai inovasi yang berhasil dikumpulkan dari berbagai kota dan kabupaten tersebut kemudian dibagikan kepada kota dan kabupaten se-Indonesia agar dapat dijadikan contoh demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Sekarang ini dilakukan peninjauan untuk melihat kembali perkembangan dari inovasi-inovasi yang dulu pernah diberikan oleh Pemkot Yogyakarta. Apakah ada kemajuan atau mungkin ada referensi lain yang telah dilakukan," ungkapnya.

Inovasi yang pernah diberikan oleh Kota Yogyakarta itu salah satunya pengelolaan informasi dan keluhan. Menurut Luthfi, inovasi ini menjadi ikon dari Kota Yogyakarta dan sudah ditiru oleh daerah-

daerah lain untuk peningkatan pelayanan publik.

"Inovasi-inovasi yang pernah dicetuskan oleh Pemkot Yogyakarta seharusnya sudah lebih maju lagi. Jangan sampai didahului oleh daerah lain yang meniru inovasi tersebut. Dari presentasi yang telah disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, menunjukkan adanya kemajuan," paparnya.

Ia mengharapkan Kota Yogyakarta tetap menjadi model yang dapat ditiru oleh daerah lain. Rencananya, kunjungan KPK ini akan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (19/3). Sebelum mengunjungi Kota Yogyakarta, KPK sudah lebih dulu berkunjung ke Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar di Provinsi Bali.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto di sela-sela kunjungan KPK mengemukakan keinginannya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan mampu melayani masyarakat. Untuk itu, Herry memilih melakukan perubahan dari dalam demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Wujud inovasi terbaru dari pemkot adalah pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menangani pengadaan barang dan jasa di atas Rp100 juta.

(ratih keswara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Humas dan Informasi			
3. Dinas Pendidikan			
4. Dinas Kesehatan			
5. Dinas Perizinan			
6.			
7. Inspektorat			

